

PERAN MEDIA SEBAGAI AGENDA SETTING PADA PENYEBARAN PERINGATAN DARURAT

Rizma Trifanny, Arnesta Aulia, Rere Dwi Agustina, Resty Salsabila, Rima Meisya Isnanda

Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

arnestaila@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan peringatan darurat yang dikeluarkan oleh akun sosial media masyarakat, seperti peringatan darurat Indonesia terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. Mengacu pada teori Agenda Setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk perhatian publik terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan informasi penting diterima secara luas dan tepat waktu. Selain itu, peran media dalam membentuk persepsi masyarakat menjadi krusial, terutama melalui penyajian fakta, analisis, dan opini yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu tersebut. Oleh karena itu, media berperan sebagai aktor utama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Media, Peringatan darurat, Keputusan MK, Teori agenda setting, Persepsi masyarakat

Abstract

The media plays a strategic role in disseminating emergency warnings issued by the social media account, such as Indonesia's recent emergency alert regarding the Constitutional Court's (MK) decision. Referring to the Agenda Setting theory by Maxwell McCombs and Donald Shaw, the media not only conveys information but also shapes public attention toward specific issues. In this context, the media acts as a communication bridge between the government and society to ensure that critical information is widely and promptly received. Furthermore, the media's role in shaping public perception is vital, particularly through the presentation of facts, analyses, and opinions that influence how people understand and respond to the issue. Therefore, the media serves as a key actor in building collective awareness of significant issues that impact the nation's life and governance.

Keywords: Media, Emergency warning, MK decision, Agenda-setting theory, Public perception

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan perkembangan politik di Indonesia terutama terkait keputusan yang dianggap dapat mengancam hak konstitusional warga negara simbol peringatan darurat "Garuda Biru" viral di media sosial Indonesia muncul pada 22 Agustus 2024. Akun Instagram dan X @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv pertama kali mengunggah gambar burung garuda berwarna biru ini. Menurut Narasi.tv, poster dengan tulisan "Peringatan Darurat"



tersebut merupakan cuplikan dari video lama yang diunggah oleh akun YouTube EAS Indonesia Concept pada 22 Oktober 2022 lalu. EAS Indonesia Concept mengambil dari siaran TVRI untuk membuat Peringatan Darurat yang mana terdapat gambar bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Akun YouTube bernama EAS Indonesia Concept fokus pada ide The Emergency Alert System (EAS) versi Indonesia dalam bentuk video. EAS merupakan sistem peringatan darurat nasional Amerika Serikat yang dirancang untuk menyebarkan pesan darurat melalui siaran radio dan televisi.

Garuda biru adalah adaptasi dari simbol negara yakni garuda Pancasila yang didominasi warna biru (Ilhamsyah, 2024:214). Peringatan darurat Garuda Biru menggunakan Garuda sebagai lambang negara dan warna biru melambangkan keadilan, ketenangan, dan kewaspadaan. Kombinasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang kuat bahwa keadaan darurat yang dihadapi memiliki hubungan langsung dengan demokrasi dan integritas negara Indonesia. Garuda Biru menjadi simbol yang terkenal dan penuh arti serta berfungsi sebagai pesan untuk mempertahankan demokrasi Indonesia dan prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Fenomena sosial ini adalah salah satu contoh berkembang pesatnya penggunaan media sosial untuk menyuarakan kekhawatiran atau peringatan terhadap situasi darurat dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Peringatan Darurat Indonesia Garuda Biru adalah sebuah panggilan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan partisipasi secara aktif dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia (Ilhamsyah, 2024). Makna dari peringatan darurat yang muncul hingga tembus trending topik di X, Instagram, Tiktok dan Google merupakan bentuk ajakan agar warga internet berkolaborasi untuk menangani masalah Peringatan Darurat Garuda. Hal ini pasalnya, Badan Legislasi DPR membuat keputusan yang bertentangan dengan putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Peringatan darurat menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan MK yang dianggap dihambat oleh DPR mengenai RUU Pilkada diantaranya pertama, ambang batas umur calon gubernur minimal 30 tahun sedangkan calon bupati serta walikota minim 25 tahun saat mendaftar kemudian kedua, syarat pengajuan calon adalah partai politik dan partai non parlemen yang memiliki kursi di DPR RI. Dalam (Firdinal, 2013) partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan dapat mendaftarkan calonnya jika mereka memperoleh 20% dari total kursi atau 25% dari suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan.

Peringatan darurat di postingan Mata Najwa menunjukkan bagaimana media sosial seperti X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) berguna untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga kebijakan yang dapat merugikan hak-hak rakyat dan demokrasi. Simbol "Garuda biru", yang kini menjadi ikon perlawanan damai, digunakan sebagai bentuk solidaritas dan seruan bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap perkembangan politik di Indonesia. Banyak tokoh masyarakat, aktivis, dan warganet menggunakan tagar seperti #KawalPutusanMK dan #TolakPilkadaAkal2an untuk memperkuat penyebaran pesan ini. Keberhasilan penyebaran simbol di media sosial juga menunjukkan potensi platform digital sebagai ruang publik modern yang memungkinkan terjadinya diskusi luas tentang berbagai masalah sosial dan politik. Namun fenomena ini juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan akurat agar tidak terjadi disinformasi atau manipulasi opini publik.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agenda Setting

Sebagaimana dijelaskan dalam *Theories of Human Communication* (Littlejohn, Karen, dan Oetzel, 2017), teori ini dibahas dalam konteks yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari studi tentang bagaimana massa media mempengaruhi persepsi publik dan memainkan peran penting dalam proses komunikasi sosial. Maxwell, McCombs dan Donald Shaw pertama kali



menggunakan teori agenda setting. Para ahli tersebut berpendapat bahwa massa media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga dapat mengubah agenda berita menjadi agenda publik. Massa media tidak selalu memutuskan "apa yang harus dipikirkan", tetapi lebih fokus pada "apa yang harus dipikirkan oleh khalayak". Littlejohn menggaris bawahi yakni dua dimensi utama mengenai teori ini dimana agenda media memiliki kemampuan untuk menyoroti suatu isu tertentu secara tak langsung membentuk agenda publik, Agenda publik sebagai persepsi masyarakat mengenai isu penting sering sesuai dengan agenda yang ditetapkan media.

Littlejohn menempatkan Teori Agenda-Setting dalam kerangka teori sistem, yang menekankan keterkaitan antara media dan berbagai institusi, seperti pemerintah dan organisasi, dalam membentuk agenda publik. Media tidak hanya menyoroti masalah tertentu (priming), tetapi juga membingkai cara masyarakat melihat masalah tersebut (framing) yang berdampak pada bagaimana khalayak menilai dan memahami masalah tersebut. Agenda setting tidak hanya berfokus pada isu yang dibahas, tetapi juga pada cara media memberikan penekanan atau framing pada isu tersebut.

Melalui kajian komunikasi oleh (Littlejohn, Karen, dan Oetzel, 2017), teori agenda setting mengungkapkan bahwa media memiliki kekuatan dalam mengarahkan opini publik serta memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis peran media pada konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Teori penting dalam kajian komunikasi ini ialah agenda setting yang utamanya berfungsi dalam menganalisis bagaimana media mempengaruhi perhatian publik terhadap masalah tertentu. Pengertian agenda setting secara etimologi didefinisikan sebagai pengaturan atau penyusunan agenda, acara, atau kegiatan hal ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh beberapa ahli komunikasi Indonesia sebagai penentuan atau penyusunan agenda (Ritonga E, 2018).

Teori agenda setting, menurut Bernard C. Cohen pada (Ritonga, 2018:34) menyatakan bahwa media massa berfungsi sebagai pusat penentuan kebenaran karena mereka memiliki kemampuan untuk memasukkan dua komponen, kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan kesadaran mengarahkan publik dan perhatian mereka pada masalah yang mereka anggap penting. Media mempunyai kemampuan untuk menentukan seberapa besar suatu peristiwa atau isu akan diperhatikan dan membuatnya melekat di benak masyarakat (Nasionalita, K. 2014). Saluran informasi, seperti media massa, menyampaikan masalah dan peristiwa kepada masyarakat umum. Melalui pemilihan dan penekanan pada isu tertentu, media menciptakan apa yang disebut sebagai *agenda* untuk masyarakat. Isu-isu yang diberitakan secara intens dan berulang kali cenderung menjadi lebih menonjol dalam pikiran publik.

Teori ini bermakna bahwa media memainkan peran penting dalam menentukan masalah apa yang harus diperhatikan atau dibahas oleh publik. Media tidak hanya memberi tahu masyarakat tentang apa yang terjadi, tetapi mereka juga mengarahkan perhatian publik pada topik-topik tertentu dengan memberi penekanan yang lebih besar pada satu topik daripada yang lain. Media dapat membentuk persepsi publik mengenai pentingnya masalah tertentu, sehingga masalah yang sering dibicarakan akan dibahas dan dianggap lebih penting oleh masyarakat.

Oleh karena itu, media tidak hanya berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi saja tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mengalihkan perhatian publik dan membentuk opini masyarakat mengenai masalah isu-isu yang sedang dibicarakan. Berdasarkan teori agenda setting pengaruh media tidak hanya pada "apa" yang diberitakan tetapi juga pada "bagaimana" masalah tersebut diberitakan dan ditanggapi oleh publik.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami bagaimana media membentuk agenda publik. Fokus penelitian diarahkan



pada analisis isi media sebagai metode pengumpulan data utama. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang diangkat oleh media X, melibatkan pengumpulan artikel, berita, atau konten lain yang diterbitkan dalam kurun waktu tertentu. Peneliti akan mencatat tema, frekuensi pemberitaan, dan cara penyajian isu-isu tersebut.

Subjek penelitian yakni media sosial X, sebuah platform berita yang dipilih berdasarkan pengaruh dan jangkauan audiensnya. Media ini dianalisis untuk mengungkap pola pemberitaan dan bagaimana isu-isu tertentu diprioritaskan atau disorot. Data dikumpulkan selama tiga hari, mencakup semua konten berita yang dipublikasikan dalam periode tersebut, sehingga memberikan gambaran tentang praktik *agenda-setting* media tersebut.

Analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menggambarkan temuan dari analisis isi secara terperinci. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengambil inti makna sebenarnya (Rusli, 2021). Peneliti mengidentifikasi pola yang muncul, mendeskripsikan tema utama yang sering diberitakan, dan menyoroti intensitas liputan untuk memberikan wawasan tentang fokus media X dalam membentuk opini publik. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan bagaimana media X memengaruhi perhatian audiens terhadap isu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media dalam Peringatan Darurat

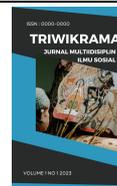
Media berperan sebagai agen penyebaran informasi dan pengawas publik dalam situasi politik di Indonesia, terutama terkait keputusan yang dianggap mengancam hak konstitusional. Keviralan simbol “Garuda Biru” di media sosial menggambarkan bagaimana media dapat memicu diskusi publik dan mobilisasi opini. Melalui platform seperti Instagram dan X, media menyajikan konten yang memicu reaksi masyarakat terhadap isu-isu sensitif, seperti hak konstitusi dan peringatan darurat. Hal menunjukkan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk wacana dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Media massa, khususnya media sosial, telah menjadi alat yang kuat dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak.

Media massa disini juga berperan krusial dalam situasi politik Indonesia, terutama saat keputusan dianggap mengancam hak konstitusional. Simbol “Garuda Biru” yang viral di media sosial juga menggambarkan mobilisasi publik terhadap isu-isu penting. Media sosial seperti Instagram dan X disini memiliki fungsi sebagai platform untuk menyuarakan kekhawatiran, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mempertahankan demokrasi. Dengan menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang keputusan

DPR yang kontroversial, media massa membantu membentuk opini dan memfasilitasi dialog politik yang konstruktif. Fenomena “Garuda Biru” jadi menunjukkan bagaimana media massa dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran dan membela prinsip-prinsip demokrasi di tengah situasi politik yang dinamis.

Peran media sebagai pengawas begitu terlihat jelas dalam kasus ini. Simbol “Garuda Biru” menjadi bentuk kritik terhadap keputusan DPR yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada. Keputusan seperti ambang batas usia calon kepala daerah (30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati / walikota) serta syarat partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI untuk mencalonkan kandidat, memicu kontroversi di kalangan masyarakat.

Media massa, melalui pemberitaan, analisis, dan diskusi publik, membantu mengangkat isu-isu ini ke permukaan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak



lepas dari pengawasan publik. Dalam demokrasi, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk agenda tertentu yang merugikan masyarakat.

Salah satu kekuatan utama dalam media massa adalah kemampuannya dalam menyampaikan informasi dengan cepat dan luas. Dalam kasus “Garuda Biru,” simbol ini pertama kali viral melalui akun Instagram dan X (dulu Twitter) @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv. Simbol tersebut diunggah pada 22 Agustus 2024, dan dalam waktu singkat, informasi tersebut menyebar ke berbagai platform, termasuk TikTok dan Google. Penyebaran yang cepat ini memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk segera memahami isu yang sedang berkembang, bahkan jika mereka sebelumnya tidak terlibat dalam diskursus politik.

Kecepatan penyebaran ini juga menyoroiti bagaimana media sosial telah menjadi alternatif yang lebih dinamis dibandingkan media tradisional. Dengan adanya agenda setting yang dirancang untuk memperbesar jangkauan konten yang mendapat banyak interaksi, media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam hitungan jam. Ini sangat relevan dalam konteks politik, di mana waktu adalah faktor penting untuk memobilisasi opini dan aksi publik. Jadi diskusi yang muncul di berbagai platform, baik yang mendukung maupun menentang pesan “Garuda Biru,” menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang untuk mengekspresikan berbagai pandangan. Hal ini mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat

Analisis Teks: Agenda Setting dalam Peringatan Darurat

Agenda setting adalah metode yang menganalisis bagaimana media membingkai informasi sehingga membentuk perhatian publik terhadap isu tertentu (Sofian, dkk. 2022).

Teks Viral Peringatan Darurat dari akun x @MataNajwa

PERINGATAN DARURAT Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang, putusan MK langsung direpson DPR dengan membuat undangundang yang dikebut hanya satu hari saja.

Sekali lagi, satu hari Hari Selasa Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas kepala daerah Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil home himpang para elit, setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam Pilkada Tapi semuanya batal, bubar Besoknya, DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama.

Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat Sehingga memungkinkan Kaesang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi.

Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final berlaku untuk semuanya. Bikin undangundang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu.

Apalagi mendengarkan aspirasi dan kita sebagai rakyat Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaesang atau PDI Perjuangan Mulamula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara.

Teman teman peringatan darurat ini perlu kita sebarkan Pertama karena kita marah dan berhak untuk itu Kedua supaya sebanyakbanyaknya orang tahu, apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatoan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan Dan saya cemas pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil.

Dalam konteks ini, teks pada peringatan darurat yang viral memainkan peran signifikan dalam menyebarkan pesan tersebut. Berikut adalah analisis berdasarkan teks yang diberikan.

1. Identifikasi Teks Viral



Isi Teks:

Teks yang diunggah menciptakan urgensi dengan narasi “PERINGATAN DARURAT.” Narasi ini mengedepankan isu penting terkait pengambilan keputusan cepat DPR dan DPRD yang dianggap melecehkan prinsip demokrasi. Kalimat seperti: - "Disebut darurat karena baru sekarang, putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang disebut hanya satu hari saja." - "Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya." membangkitkan rasa marah dan keterdesakan untuk bertindak. Narasi ini didukung oleh frasa yang menguatkan legitimasi seperti “putusan MK mengikat dan final,” yang menekankan pelanggaran serius terhadap proses demokrasi.

2. Penyebab Teks Viral

Narasi ini menarik perhatian karena beberapa faktor:

- Diksi yang Emosional, Penggunaan kata seperti "darurat," "melecehkan nalar," dan "pembangkangan sipil" membangun keterlibatan emosional.
- Urgensi dan Relevansi, Frasa seperti "bikin undang-undang dalam sehari" menggambarkan ketegesaan yang tidak wajar, memancing perhatian publik untuk mempertanyakan proses tersebut.
- Penyajian Data, Teks menyajikan data konkret (putusan MK, usia calon kepala daerah), sehingga memberikan konteks dan kepercayaan pada narasi.

3. Peran Media dalam Agenda Setting

Dalam kasus ini, media menyetting isu dengan cara:

- Menonjolkan Framing, Menonjolkan bagaimana DPR bertindak tidak transparan dan tidak demokratis, sehingga membentuk persepsi negatif terhadap institusi tersebut.
- Memfasilitasi Penyebaran, Akun dengan audiens besar seperti @MataNajwa memperkuat jangkauan pesan melalui engagement tinggi (suka, komentar, posting ulang).
- Mendorong Aksi, Dengan seruan “teman-teman peringatan darurat ini perlu kita sebar,” teks memanfaatkan kemampuan media sosial untuk menggalang partisipasi aktif dari masyarakat.

4. Relevansi dengan Agenda Setting

Teks ini merupakan contoh penerapan agenda setting karena berhasil mengarahkan perhatian publik

pada:

- Isu Proses Legislasi Tidak Transparan, Media menempatkan isu ini sebagai prioritas dengan menggambarannya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.
- Ketidaksesuaian Proses Hukum, Menyoroti bahwa DPR tidak mematuhi putusan MK, yang menggugah rasa keadilan masyarakat.

Melalui analisis teks ini, terlihat bahwa penyebaran narasi peringatan darurat didorong oleh efektivitas framing teks yang membangkitkan emosi, menonjolkan urgensi, dan memberikan data yang relevan. Media sosial memegang peran penting sebagai alat untuk menyetting agenda publik, dengan melibatkan audiens secara langsung melalui engagement tinggi.

Peran Media dalam Menyebarkan Peringatan Darurat

Media sosial telah menjadi ruang strategis dalam menyebarkan pesan-pesan penting terkait gerakan *Peringatan Darurat Indonesia*. Akun-akun berpengaruh seperti @najwashihab, @matanajwa, dan @narasiv memainkan peran kunci sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, dan penggerak solidaritas digital. Dengan memanfaatkan tagar populer seperti



#KawalPutusanMK dan #PeringatanDarurat, akun-akun ini berhasil membangun narasi yang tidak hanya mencerminkan keresahan publik tetapi juga memobilisasi dukungan secara masif. Sebagaimana diungkapkan oleh Samosir (2024), media sosial memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat, sekaligus menjadi katalis dalam membangun kesadaran kolektif.

Mengacu pada teori *agenda setting*, peran media sosial dalam memfokuskan perhatian publik terhadap isu tertentu menjadi sangat jelas. Akun seperti @najwashihab secara konsisten menyajikan fakta-fakta tentang ancaman demokrasi yang muncul akibat revisi UU Pilkada. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat memusatkan perhatian pada isu-isu penting. Sebagai hasilnya, aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi damai pada Agustus 2024 dapat terkoordinasi dengan baik melalui penyebaran informasi yang cepat dan terarah.

Namun, peran media sosial juga memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan. Tantangan seperti disinformasi dan manipulasi opini publik seringkali muncul bersamaan dengan gelombang partisipasi digital. Dalam hal ini, akun-akun terpercaya seperti @najwashihab dan @matanajwa memberikan nilai tambah melalui kehadiran mereka sebagai *fact-checkers* yang menjelaskan konteks, meluruskan informasi yang salah, dan membangun narasi yang transparan. Dengan pendekatan ini, media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi tetapi juga benteng melawan polarisasi dan hoaks.

Melalui aksi yang direncanakan dengan cermat, media sosial, khususnya akun-akun berpengaruh ini, berhasil menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat pesan-pesan kritis terhadap kondisi politik saat itu. Dalam gerakan *Peringatan Darurat Indonesia*, peran media sosial terbukti bukan sekadar menyampaikan pesan tetapi juga menciptakan ruang publik modern yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih inklusif dan efektif dalam demokrasi.

Peran Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Media sosial memiliki peran utama sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, berdiskusi, dan berpartisipasi mengenai berbagai isu yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Saat isu mengenai MK mengeluarkan putusan yang dianggap kontroversial dan berpotensi memicu ketegangan sosial, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Kami meninjau melalui platform X, masyarakat banyak menyuarakan pendapat mereka baik dalam bentuk dukungan ataupun penolakan.

Melalui platform X dengan nama akun @MataNajwa memposting simbol peringatan darurat "Garuda Biru" viral di media sosial Indonesia muncul pada 22 Agustus 2024. Dalam akun @MataNajwa mengunggah 2 postingan terkait peringatan darurat. Postingan tersebut menuai banyak respon dari masyarakat pengguna X. Dari postingan tersebut terdapat masing-masing 10 juta dan 4,5 juta tayangan, 134 ribu dan 88 ribu postingan ulang, serta 2,9 ribu dan 1,8 ribu komentar masyarakat. Dalam kedua postingan tersebut memiliki isi yang berbeda. Pada postingan yang pertama disajikan simbol peringatan darurat "Garuda Biru", dan pada postingan lainnya membahas tentang maksud dari akun @MataNajwa memposting peringatan darurat. Tujuan dari media tersebut mengunggah berita ini yaitu untuk mengajak masyarakat agar menghentikan segala upaya dari Presiden dan DPR untuk menentang putusan Mahkamah Konstitusi.



Isi dari postingan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat turut khawatir mengenai isu yang sedang terjadi. Dengan hastag #KawalPutusanMK dan #TolakPilkadaAkal2an masyarakat ramai menyuarakan pendapat, penolakan, maupun ketidakpedulian mereka terhadap isu itu. Terdapat komentar yang menyuarakan ketidakpeduliannya terhadap peringatan darurat itu pada akun @AsepSob23025095 "Lagian mau demokrasi kaya gimana engga ngaruh ke saya Mbak Nana tetep usaha sendiri saya cukup kondusif aja kondisi buat apa demo buang waktu tenaga masih banyak yang saya harus perjuangkan terutama keluarga pribadi apa untungnya ikut demo yang untung anda2 jurnalis ama youtuber."

Ada pula akun yang menyuarakan penolakannya dengan komentar @HanyaSunjae "agak lain, agak lain emang... pokoknya aku pasti tuntutan semua pemimpin yang buat rakyat sengsara... padahal didunia cuma sebentar dunia cuma titipan aku berdoa semoga masih banyak pemimpin yang sadar." Tidak sedikit pula masyarakat yang menyuarakan keprihatinannya melalui komentar dengan akun @LyYukii070498 "Sedih temen-temen ku malah bilang gini 'ini cuma isu, kenapa pada nyalahin jokowi' pliss gimana cara jelasin pake logika ke mereka." Dari contoh komentar masyarakat di akun @MataNajwa, membuktikan masih banyak masyarakat yang peduli terhadap kondisi Negara ini.

Partisipasi masyarakat dalam menanggapi peringatan darurat juga melibatkan peran mereka dalam proses demokrasi, seperti mendesak perbaikan hukum atau mendukung langkah-langkah reformasi yang diperlukan. Penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka dengan cara yang lebih luas, sehingga suara mereka dapat didengar oleh para pembuat kebijakan. partisipasi masyarakat yang aktif dalam menanggapi keputusan-keputusan yang diambil oleh MK tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar dalam setiap perubahan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, media sosial menjadi salah satu instrumen



vital dalam menghubungkan keputusan hukum dan konstitusional dengan realitas sosial yang ada.

KESIMPULAN

Fenomena "Garuda Biru" yang viral di media sosial Indonesia pada 22 Agustus 2024 mencerminkan kekuatan media dalam membentuk opini publik dan mobilisasi masyarakat terhadap isu-isu politik yang dianggap mengancam hak konstitusional. Simbol ini, yang diadaptasi dari lambang negara Garuda Pancasila, menjadi representasi dari peringatan darurat yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif, khususnya terkait RUU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Peran Media Sosial melalui akun-akun berpengaruh seperti @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv, telah berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan mendorong partisipasi masyarakat. Penyebaran simbol "Garuda Biru" menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menggerakkan opini publik dan mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam menangani isu-isu penting. Peringatan darurat ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap keputusan DPR yang dianggap merugikan demokrasi dan hak-hak konstitusional. Dengan mengangkat isu-isu seperti ambang batas usia calon kepala daerah dan syarat pencalonan, media sosial berhasil memicu diskusi publik yang konstruktif dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik. Melalui penggunaan tagar seperti #KawalPutusanMK dan #PeringatanDarurat, masyarakat dapat bersatu dalam menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun kesadaran kolektif dan solidaritas di antara warga negara. Meskipun media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi, tantangan seperti disinformasi dan manipulasi opini publik tetap ada. Oleh karena itu, penting bagi akun-akun terpercaya untuk berperan sebagai fact-checkers dan memberikan konteks yang jelas agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang salah.

SARAN

Diperlukan program edukasi media yang lebih intensif untuk masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima dari media sosial. Edukasi ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik dan dampak dari keputusan yang diambil oleh pemerintah serta media massa dan media sosial harus terus berperan sebagai pengawas publik yang kritis. Mereka perlu mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dan mendorong diskusi yang konstruktif di antara berbagai kalangan. Berikut beberapa saran yang mampu meningkatkan kepedulian terhadap sistem politik

1. Kolaborasi Antara Media dan Masyarakat

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara media, masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, atau kegiatan lain yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting secara terbuka.

2. Pengembangan Platform Digital

Pengembangan platform digital yang aman dan transparan untuk diskusi publik dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Platform ini harus dirancang untuk mencegah penyebaran disinformasi dan memfasilitasi dialog yang konstruktif.

3. Dukungan terhadap Gerakan Sosial



Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan terhadap gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional dan demokrasi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendengarkan aspirasi mereka.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat meningkat, dan hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga dengan baik. Fenomena "Garuda Biru" menjadi pengingat bahwa suara rakyat sangat penting dalam menjaga demokrasi dan integritas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, R. (2024, Agustus 21). Apa Maksud Unggahan "Peringatan Darurat" dan Hubungannya dengan Putusan MK?. Narasi. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-maksud-unggahan-peringatan-darurat-dan-hubungannya-dengan-putusan-mk>.
- Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 649-674.
- Ilhamsyah, M. (2024). ANALISIS FRAMING PERINGATAN DARURAT PADA AKUN INSTAGRAM NARASI. TV. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 5(2), 209-216.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A., & Oetzel, G John. (2017). *Theories of Human Communication (11th ed)*. Long Grove, Illinois : Waveland Press, Inc. Tersedia dari Internet Archive. <https://archive.org/details/theoriesofhumanc0011litt/page/n5/mode/2up>.
- Nasionalita, K. (2014). Relevansi teori agenda setting dalam dunia tanpa batas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 5(2), 156-164.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Simbolika Research and Learning In Communication Study*, 4(1), 32-41.
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/ deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Samosir, S. L. (2024, Oktober 4). Refleksi 'Peringatan Darurat': Kekuatan media sosial dalam memobilisasi demokrasi. *The Conversation*. <https://theconversation.com/refleksi-peringatan-darurat-kekuatan-media-sosial-dalam-memobilisasi-demokrasi-237485>.
- Sofian, H., SY, Y. T., Putra, S. J., Rahmat, L. A., & Suryantara, I. M. P. (2022). Analisis Agenda Setting Pemberitaan MotoGP Mandalika Pada RRI Mataram. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 11-20.